

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi dan kegiatan yang dilakukan selama Praktik Kerja Lapangan di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. **Prosedur Penatausahaan Belanja menggunakan Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran Kas**

Sistem informasi akuntansi pengeluaran kas di BKAD Kabupaten Sleman telah berjalan secara terstruktur melalui tahapan-tahapan yang meliputi perencanaan anggaran, pencairan dana, verifikasi dokumen pertanggungjawaban, hingga pelaporan keuangan. Proses ini didukung oleh sistem informasi yang digunakan untuk mencatat dan mengelola data transaksi secara akurat dan transparan. Seluruh pengeluaran kas disesuaikan dengan mekanisme administrasi keuangan daerah yang berlaku, serta dikendalikan melalui sistem berbasis digital seperti SIPD.

2. **Faktor Perubahan dari SIADINDA ke SIKD dan dari SIKD ke SIPD**
Perubahan sistem dari SIADINDA ke SIKD, dan selanjutnya ke SIPD, didorong oleh upaya pemerintah pusat untuk menyatukan dan menstandarkan sistem informasi pemerintahan di seluruh daerah. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan integrasi data, transparansi pengelolaan anggaran, serta mempermudah pengawasan dan pelaporan keuangan. Sistem yang lebih terpusat juga memungkinkan pemerintah pusat mengakses dan memantau kinerja keuangan daerah secara real time.

3. **Dampak Perubahan Sistem Informasi terhadap Efektivitas Kerja**
Perubahan sistem informasi dari waktu ke waktu memberikan dampak yang signifikan terhadap efektivitas kerja di BKAD Kabupaten Sleman. Dengan penerapan SIPD yang lebih modern dan terintegrasi, proses pengelolaan keuangan menjadi lebih efisien, akuntabel, dan minim kesalahan input. Selain itu, sistem baru juga meningkatkan kecepatan dalam penyusunan laporan serta memudahkan koordinasi antar unit kerja. Meskipun pada awalnya terdapat tantangan adaptasi, secara keseluruhan perubahan sistem memberikan pengaruh positif terhadap kualitas kerja dan pelayanan administrasi keuangan daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan mengenai sistem informasi akuntansi pengeluaran kas serta perubahan sistem dari SIADINDA ke SIKD dan kemudian ke SIPD di BKAD Kabupaten Sleman, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. **Peningkatan Kemampuan SDM melalui Pelatihan Rutin**
Agar pegawai dapat mengikuti perkembangan sistem informasi yang terus berubah, disarankan agar dilakukan pelatihan secara rutin. Dengan begitu, para pegawai bisa lebih siap dalam menghadapi perubahan sistem dan meminimalkan kesalahan dalam proses administrasi keuangan.
2. **Evaluasi Sistem Secara Berkala**
Meskipun sistem SIPD telah memberikan dampak positif, evaluasi tetap perlu dilakukan secara berkala. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sistem berjalan dengan baik dan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang mungkin terjadi di lapangan.
3. **Peningkatan Fasilitas Teknologi**
Supaya sistem informasi bisa digunakan secara optimal, BKAD perlu meningkatkan sarana pendukung seperti komputer, jaringan internet, dan sistem keamanan data. Infrastruktur yang baik akan sangat membantu kelancaran pengelolaan keuangan daerah secara digital.
4. **Meningkatkan Koordinasi Antar Bidang**
Dengan adanya sistem terintegrasi seperti SIPD, koordinasi antar bidang dalam BKAD sangat penting. Oleh karena itu, perlu adanya komunikasi yang baik dan pembagian tugas yang jelas agar sistem bisa berjalan lebih efektif.
5. **Sosialisasi kepada OPD Pengguna Anggaran**
Perubahan sistem informasi juga perlu diketahui oleh OPD lain yang terlibat dalam proses keuangan. Sosialisasi dan pendampingan kepada OPD pengguna anggaran akan membantu mempercepat proses administrasi dan mengurangi kesalahan dalam penggunaan sistem.